



Ikhtisar Eksekutif

Kewajiban yang harus dipenuhi suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, dinyatakan Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.



Kayuh Serentak Langkah Sepijak

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) maupun indikator sasaran (*impact*). Pandemi COVID-19 secara berangsur telah memasuki tahap endemi sehingga secara perlahan rata-rata disetiap realisasi pada kinerja penyelenggaraan pemerintah mengalami pertumbuhan.

Strategi dalam mewujudkan Visi dan Misi periode tahun 2021-2026 ditetapkan dengan 13 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja yang diperjanjikan dalam kinerja pada tahun 2022. Secara umum capaian kinerja utama Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	65,8	60,41	91,8%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	73,23	73,43	100,27%	Sangat Tinggi



Kayuh Serentak Langkah Sepijak

3	Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76,02	76,05	100,04%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	0,87	1,39	159,77%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,29	73,46	100,23%	Sangat Tinggi
6	Bertambahnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	9,45	16,86	178,41%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	B (63)	CC(57,01)	90,49%	Tinggi
		Nilai Predikat SAKIP	B (68)	B(60,11)	88,39%	Tinggi
		Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Tinggi (3,80)	Tinggi (3,70)*	97%	Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (84)	B (80,69)	96,05%	Tinggi
8	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (43)	Kurang Inovatif (33,28)	77,39%	Tinggi
9	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	49	49,48	100,97%	Sangat Tinggi



Kayuh Serentak Langkah Sepijak

10	Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	88,46	67,30	76,07%	Tinggi
11	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	57,64	63,76	110,61%	Sangat Tinggi
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	47,80	14,26	29,83%	Cukup
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	20	16	80%	Tinggi
		Persentase Permukiman yang Tertata	20	18,29	91,49%	Tinggi
		Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	30,63	31,83	103,92%	Sangat Tinggi
12	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,61	0,83	136,06%	Sangat Tinggi
		Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,50	0,33	66%	Cukup
13	Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi	Persentase Titik Lokasi / Desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai	96	85,18	88,72%	Tinggi



Kayuh Serentak Langkah Sepijak

Akumulasi dari hasil pengukuran terhadap 13 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 97,88% dengan kategori Tinggi.

Secara kumulatif, keberhasilan dan capaian kinerja tahun 2022, belum secara maksimal pada beberapa indikator kinerja sasaran strategis tertentu. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan dan kendala antara lain yaitu penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja yang belum optimal, sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi SDM yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang sulit terjangkau dalam pencapaian program dan kegiatan pembangunan. Upaya meminimalisir kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan berbagai cara melalui penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kepulauan Anambas, serta peningkatan kualitas SDM yang berbasis kompetensi.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

Tarempa, 31 Desember 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

ABDUL HARIS, SH., MH